

# EFEKTIVITAS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA BONGKANG KECAMATAN HARUAI KABUPATEN TABALONG

Noraisa Faiza ; Jamaludin)\* Ahmat Harahap)\*\*  
Email : [raisahasta1@gmail.com](mailto:raisahasta1@gmail.com) ; [jamaltjg7777@gmail.com](mailto:jamaltjg7777@gmail.com)\* ;  
[ahmatharahap76@gmail.com](mailto:ahmatharahap76@gmail.com)\*\*

Departemen Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong  
Komplek Stadion Olah Raga Saraba Kawa Pembataan Tanjung-Tabalong  
Telp.Fax. 0526 – 2022484, Kode Pos 71571

## ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan efektivitas Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Bongkang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, *key informan* dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yaitu kepala desa 1 orang, ketua BPD 1 orang, dan masyarakat 3 orang. Teknik analisis data menurut Miles Huberman, 2014 yakni : 1) Kondensasi Data (proses pemilihan). 2) Display Data atau Penyajian Data. 3) Conclusions Drawing atau Verifying (Menarik Kesimpulan).

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Bongkang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong dapat dikategorikan cukup efektif.

**Kata Kunci : Efektivitas, Fungsi dan Pembangunan.**

## EFFECTIVENESS OF VILLAGE FUNCTION AGENCY IN THE IMPLEMENTATION OF DEVELOPMENT IN BONGKANG VILLAGE, HARUAI SUB-DISTRICT, TABALONG REGENCY

### ABSTRACT

The purpose of this research is to find out and explain the effectiveness of the Village Consultative Body in the Implementation of Development in the Bongkang Village, Haruai District, Tabalong Regency.

This research is included in the type of descriptive qualitative research. The techniques used in this study were interviews, key informants in this study were 5 people, namely 1 village head, 1 BPD chair, and 3 community members. Data analysis techniques according to Miles Huberman, 2014 namely: 1) Data Condensation (selection process). 2) Data Display or Data Presentation. 3) Drawing or Verifying Conclusions.

The results of this study indicate that the Effectiveness of the Functions of the Village Consultative Body in the Implementation of Development in the Bongkang Village, Haruai District, Tabalong Regency can be categorized quite effectively.

**Keywords: Effectiveness, Function and Development.**

### PENDAHULUAN

Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintah Desa adalah sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintahan kabupaten. Pemerintahan Desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan

daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu sistem mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat di dukung dan di tentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari pemerintah daerah.

Dalam Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 61, BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melaksanakan tugas pengawasan kinerja Kepala Desa, serta bersama-sama dengan Kepala Desa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Perdes). BPD mempunyai hak untuk mengawasi dan mendapatkan keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dari Kepala Desa. Sebagai lembaga perwakilan masyarakat di tingkat desa dan melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa, BPD merupakan mitra kerja pemerintah desa dan untuk saling mendukung dalam musyawarah serta membahas peraturan pembangunan di tingkat Desa. Dengan demikian Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa Pada Pasal 31 BPD disebutkan mempunyai fungsi sebagai berikut: Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Berdasarkan fungsi diatas, didalam pelaksanaan Pemerintahan Desa BPD memiliki peran yang sangat penting karena merupakan wadah menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan Desa dapat dilihat dari seberapa efektifnya peran serta BPD

kedua belah pihak bersama-sama mengemban amanah dari masyarakat. BPD memiliki tugas bersama dengan Kepala Desa untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan fisik Desa. Setiap program pembangunan di desa dimaksudkan untuk membantu, dan memacu masyarakat desa membangun berbagai sarana dan prasarana desa yang diperlukan. Untuk itu, Badan Permusyawaratan Desa harus mampu melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik dalam pembangunan desa. Karena pembangunan yang baik akan membawa perubahan desa kearah yang lebih baik juga. dalam menjalankan fungsinya. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yang *Pertama* adalah Untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Bongkang, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong. *Kedua* Untuk Menganalisis faktor faktor yang menghambat Efektivitas Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong. Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan Mendukung teori Gibson tentang Efektivitas yaitu: Kejelasan tujuan yang ingin dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, proses analisa

dan perumusan kebijakan yang mantap, perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, tersedianya sarana

## LANDASAN TEORI

### 1. Definisi Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Mulyasa (2002:82) dikemukakan bahwa efektif berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), manjur atau mujarab, dapat membawa hasil. Jadi efektivitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas adalah bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional. Menurut Akmal (2006:36) menyatakan bahwa efektivitas adalah pencapaian usaha yang sesuai dengan rencananya (doing the right things) atau rencana hasil dibandingkan dengan realisasi hasil. Menurut Gie (2000:24) efektivitas adalah keadaan atau kemampuan kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan nilai guna yang diharapkan.

Tjokroamidjojo dalam Pasolong (1987:3) mengatakan bahwa efektivitas, agar pelaksanaan administrasi lebih mencapai hasil seperti direncanakan, mencapai sasaran tujuan yang ingin dicapai dan lebih berdaya hasil. Gibson (2000:28) efektivitas adalah kontek

dan prasarana kerja, pelaksanaan yang efektif dan efisien, sistem pengawasan dan pengendalian yang mendidik.

perilaku organisasi yang merupakan hubungan antara produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan dan pengembangan.

Lipham dan Hoeh dalam Mulyasa (2002:83) meninjau efektivitas suatu kegiatan dari faktor pencapaian tujuan, yang memandang bahwa efektivitas berhubungan dengan pencapaian tujuan bersama bukan pencapaian tujuan pribadi.

Berdasarkan pendapat para ahli yang dikemukakan diatas, Menurut Gibson (2000) dalam Donni bahwa efektivitas dapat diuraikan dengan beberapa indikator sebagai berikut :

#### 1. Kejelasan Tujuan yang Ingin dicapai

Hal ini dimaksudkan agar anggota dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.

#### 2. Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan

Telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak

tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

### 3. Proses Analisis dan Perumusan Kebijakan yang Mantap

Berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

### 4. Perencanaan yang Matang

Pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.

5. Penyusunan Program yang Tepat Suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja. Tersedianya sarana dan prasarana kerja

Salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan kerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.

### 6. Pelaksanaan yang Efektif dan Efisien

Bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

8. Mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

## 1. Definisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Menurut Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 BPD merupakan lembaga perwakilan rakyat desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta bersama kepala desa BPD adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Dari tiga fungsi ini sudah jelas BPD adalah lembaga yang memiliki kekuatan dalam menyepakati peraturan desa yang bakal menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan desa. BPD memiliki kekuatan untuk menyampaikan aspirasi warga. Penyampaian aspirasi dilakukan melalui beberapa tahap kerja yakni BPD harus melakukan penggalian aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan ke BPD dan mengelola aspirasi masyarakat sebagai sebuah energi positif dalam merumuskan langkah kebijakan desa.

BPD juga menyalurkan aspirasi dari warga desa pada Kepala desa yang kemudian dijadikan pedoman oleh kepala desa beserta jajarannya dalam melaksanakan program pembangunan desanya. BPD juga sekaligus memiliki kekuatan untuk mengawasi proses pembangunan desa dalam seluruh aspek. Ini menunjukkan betapa kuatnya BDP dalam ranah politik sosial dan desa.

### 1. Definisi Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut Westa (1985 : 17) Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.

Menurut Abdullah (1987 : 5) Pelaksanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Menurut Gordon (1986:58) Pelaksanaan berkenaan dengan berbagai kegiatan yang di arahkan pada realisasi program.

Lembaga Administrasi Negara RI merumuskan Pengertian Pelaksanaan adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;
- b. Resources (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;
- c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program;
- d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini

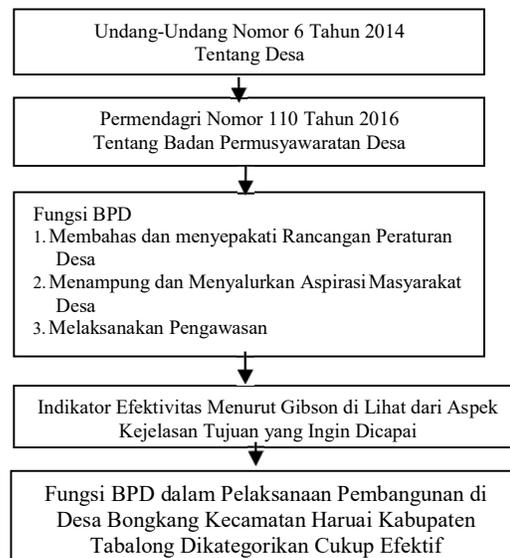
tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

## 2. Definisi Pembangunan

Pengertian pembangunan secara umum pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Menurut Siagian (1999:4) pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation-buiding). Menurut Portes dalam Sarlinda (2018) mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Sama halnya dengan Portes, Menurut Deddy T. Tikson (2005) bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Menurut Soekanto dalam Hikmah (2016) Pembangunan

sebenarnya merupakan suatu proses yang terencana dan dikehendaki. Dari pendapat di kemukakan bahwa pembangunan dari sisi proses perubahan, dimana perubahan tersebut dilakukan oleh masyarakat karena menginginkan perubahan itu sendiri, didasari oleh kebutuhan masyarakat dari berbagai aspek kehidupan manusia sehari-hari.

### Kerangka Konseptual



## METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Di dalam penelitian termasuk jenis penelitian deskriptif diartikan sebagai prosedur untuk memecahkan masalah dan untuk mendapatkan informasi, yang diselidiki dengan menggambarkan semua keadaan subyek atau objek baik perorangan, lembaga-lembaga masyarakat yang lebih mendalami fenomena fenomena yang diteliti dengan

menggunakan data-data olahan dari hasil penelitian tersebut. Maka dalam penelitian ini menggunakan metode analisis dengan teknik pendekatan secara kualitatif dengan tujuan adalah mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial. Dalam penelitian ini untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu keadaannya pada saat kita melakukan penelitian tersebut.

#### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Desa Bongkang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong.

#### 3. Sumber Data

##### a. Sumber Data Primer

Informan:

Kepala Desa : 1 orang

Ketua BPD : 1 orang

Masyarakat : 3 orang

##### b. Sumber Data Sekunder

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

b. Wawancara

c. Dokumentasi

#### 5. Teknik Analisa Data

a. Pengumpulan data

b. Reduksi Data

c. Penyajian Data

d. Penarikan Kesimpulan

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### 1. Membahas Rancangan Peraturan Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dari kelima informan dapat disimpulkan bahwa kejelasan tujuan yang ingin dicapai oleh BPD dalam membahas rancangan peraturan desa dapat dikategorikan efektif.

#### 2. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa. Berdasarkan hasil wawancara dari kelima informan dapat dikategorikan efektif.

#### 3. Melakukan Pengawasan

Berdasarkan hasil wawancara dari kelima informan dapat disimpulkan bahwa kejelasan tujuan yang ingin dicapai oleh BPD dalam melakukan pengawasan terhadap Pembangunan di desa dapat dikategorikan cukup efektif.

#### 4. Menampung Aspirasi Masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dari kelima informan dapat disimpulkan bahwa kejelasan tujuan yang ingin dicapai oleh BPD dalam Menampung Aspirasi Masyarakat Desa dapat dikategorikan cukup efektif.

bahwa kejelasan tujuan yang ingin dicapai oleh BPD dalam menyepakati rancangan peraturan desa dapat dikategorikan efektif.

5. Menyalurkan Aspirasi Masyarakat  
Berdasarkan hasil wawancara dari kelima informan dapat disimpulkan bahwa kejelasan tujuan yang ingin dicapai oleh BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dikategorikan cukup efektif.

### **Pembahasan**

Kejelasan Tujuan yang Ingin di Capai Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Bongkang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong dengan hasil wawancara langsung dapat dikategorikan cukup efektif antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa beserta anggotanya dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Efektivitas Kejelasan Tujuan Yang Ingin Dicapai adalah rangkaian yang dilaksanakan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan kegiatan-kegiatan, tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kejelasan Tujuan merupakan suatu sasaran dalam mengelola program yang dilakukan masyarakat, Kepala Desa untuk kegiatan pelaksanaan pembangunan di desa agar lebih baik dari sebelumnya dan dapat di pertanggung jawabkan di kemudian hari

apa yang sudah dilaksanakan dalam musyawarah desa baik membahas tentang jalan, jembatan, memperbaiki langgar-langgar ataupun yang lainnya yang diperlukan oleh masyarakat. Efektivitas Kejelasan Tujuan Yang Ingin Dicapai oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam kegiatan pembangunan di desa cukup efektif. Badan Permusyawaratan Desa selaku pengambilan keputusan bersama anggotanya dalam hal yang berkaitan dengan pembangunan desa yang di programkan harus sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan masyarakat agar tidak ada hambatan dan kesulitan di desa, Sehingga Badan Permusyawaratan Desa dan anggotanya benar-benar menyeleksi yang mana harus dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan secara cepat agar tidak ada yang merasa dirugikan baik dari pihak pemerintah maupun dari masyarakat di desa setempat.

### **KESIMPULAN**

Efektivitas Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Bongkang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong dapat dikategorikan cukup efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam Ibrahim I dan Juni Pranoto. 2011. *Revitalisasi Administrasi Pembangunan*. Alfabeta. Bandung.
- Afifuddin. 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Alfabeta. Bandung.
- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Mulyasa. 2002. *Manajemen Berbasis Sekolah (Konsep, Strategi, dan Implimentasi)*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Pasolong, Harbani. 2016. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta. Bandung
- Priansa, Donni Juni dan Agus Garnida. 2013. *Manajemen Perkantoran (efektif, efesien, dan professional)*. Alfabeta. Bandung
- Siagian, Sondang P. 1999. *Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi, dan Strateginya)*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Suryono. 2001. *Teori dan Isu Pembangunan*. Universitas Malang Press. Malang.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Erlangga. Jakarta
- Ummam, Khaerul. 2012. *Manajemen Organisasi*. Pustaka Setia. Bandung.

### Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa